

ABSTRAK

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ini bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Namun dalam praktiknya tujuan perkawinan tidak selalu dapat terwujud di setiap perkawinan. Tidak mustahil jika dijumpai beberapa hal yang menyebabkan keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi sehingga berujung pada perceraian. Hal yang paling krusial sebagai akibat hukum terjadinya perceraian adalah terkait pembagian harta bersama. Pembuktian harta bersama ini mengalami kendala apabila dikaitkan dengan prinsip kerahasiaan bank atas tabungan dan deposito yang disimpan atas nama salah satu pihak suami atau istri.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian harta bersama dalam perkara perceraian ditentukan oleh ada atau tidaknya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri. Tanpa adanya perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersama dibagi secara proporsional bagi kedua belah pihak. Sebaliknya dengan adanya perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersama ditentukan atau berpedoman pada isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Rahasia bank atas data nasabah penyimpan dan simpanannya dapat diterobos untuk kepentingan perkara perceraian terkait pembagian harta bersama sebagaimana kaidah hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Putusan ini menegaskan bahwa harta bersama adalah milik suami dan istri secara bersama-sama sehingga masing-masing harus dapat perlindungan atas hak tersebut dan tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh salah satu pihak.

Kata Kunci: *sita marital, harta bersama, rahasia bank.*

ABSTRACT

Marriage is a legal relationship which is a legal relationship between a man and a woman who has fulfilled the conditions of marriage for a period of time that is as long as possible based on the Godhead. This marriage aims to form a harmonious, happy, and eternal family. But in practice the purpose of marriage cannot always be realized in every marriage. It is not impossible if several things are found that cause the situation of the household is not harmonious anymore so that it leads to divorce. The most crucial thing as a legal consequence of a divorce is related to the sharing of shared assets. Proof of this joint asset has problems when it is associated with the principle of bank secrecy over savings and deposits held in the name of one of the husband or wife.

The research method used is a normative juridical approach to the problem of the statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study are the distribution of joint assets in divorce cases determined by the presence or absence of marriage agreements made by husband and wife. Without a marriage agreement, the sharing of shared assets is divided proportionally for both parties. Sebaliknya with the marriage agreement, the distribution of shared assets is determined or guided by the contents of the marriage agreement itself. The validity of bank secrets for depositing customer data and deposits can be breached for the benefit of divorce cases related to the distribution of shared assets as stated in the Constitutional Court Decree Number 64/PUU-X/2012. This decision confirms that joint property belongs to the husband and wife together so that each must be able to protect these rights and may not be taken arbitrarily by one of the parties.

Keywords: confiscated marital, shared assets, bank secrets.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur penyusun ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“SITA MARITAL ATAS SIMPANAN BANK PADA SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012)”**. Tesis ini disusun dalam rangka persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeki dan hidayahNya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Papa Ir. Dadi Suhardi dan Mama Nina Nuraenayatin, S.ST., M.Pd. selaku Orang Tua penulis yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan moral serta kasih sayang sehingga diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini. Love you Mom Dad...
3. Ibu Dr. Indira Retno A, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi S, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dan memberi banyak masukan, dukungan, doa kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

4. Dr. Trisadini Prasastina U, S.H., M.H. , Dr. Zahry Vandawati C, S.H., M.H. , Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. drg. Sintya Kusuma Wardani yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis sehingga dalam menyelesaikan tesis ini menjadi lebih semangat. Thank You ☺
6. Mbak Ayu dan Mbak Dhanny yang selalu memberi saran kepada penulis dan memotivasi segera dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Adi Kurnia, Naufal Riefhano, Fachreza Syafrimal, Hilman Firmansa dan seluruh teman – teman SMA Muhammadiyah 2 Surabaya yang telah memberikan doa dan dukungan selama pengerjaan tesis ini.
8. Teman – teman S1 FH Unair 2012 dan S2 Kenotariatan Unair 2016 yang telah memerikan doa dan dukungan selama pengerjaan tesis ini.
9. Serta pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah menghibur dan memberikan semangat kepada penulis setiap harinya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya di bidang hukum perkawinan di Indonesia serta bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Amin.

Surabaya, 17 Januari 2020

Penyusun

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.